



Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa dengan Transparansi Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Pemerintah Desa di Kabupaten Pati)

Abdul Latif^{1*}, Amir Mahmud²

^{1,2}Jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

DOI: 10.15294/baej.v3i2.62451

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima, 6 Juli 2022
Disetujui, Agustus 2022
Dipublikasikan, 31
Agustus 2022

Keywords:

Presentation of Financial Statements, Accessibility of Financial Statements, Accountability of Financial Management, Transparency

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Dengan Transparansi Sebagai Variabel Intervening. Populasi dalam penelitian ini yaitu pengelola keuangan yang ada pada Pemerintah Desa di Kabupaten Pati. Populasi dalam penelitian ini adalah pengelola keuangan desa di 21 kecamatan di Kabupaten Pati yang terdiri dari 401 desa dan sampel penelitian ini sebanyak 45 desa atau 356 responden. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner. Analisis data menggunakan path analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penyajian laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Kabupaten Pati. Aksesibilitas Laporan Keuangan Desa memiliki pengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Kabupaten Pati. Transparansi berpengaruh secara signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. Transparansi mampu memediasi hubungan pengaruh Penyajian Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan keuangan Desa. Transparansi mampu memediasi hubungan pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan keuangan Desa.

Abstract

The purpose of this study was to analyze the Effect of Financial Statement Presentation and Financial Report Accessibility on Village Financial Management Accountability with Transparency as an Intervening Variable. The population in this study is the financial manager at the Village Government in Pati Regency. The population in this study were village financial managers in 21 sub-districts in Pati Regency which consisted of 401 villages and the sample of this study was 45 villages or 356 respondents. The data collection method used is a questionnaire. Data analysis using path analysis. The results showed that the presentation of financial statements had a positive and significant effect on the Accountability of Village Financial Management in Pati Regency. Accessibility of Village Financial Reports has an influence on the Accountability of Village Financial Management in Pati Regency. Transparency has a significant effect on Village Financial Management Accountability. Transparency is able to mediate the relationship between the influence of Financial Statement Presentation on Village Financial Management Accountability. Transparency is able to mediate the relationship between the influence of Accessibility of Financial Statements on Accountability of Village Financial Management.

© 2022 Universitas Negeri Semarang

□ Alamat korespondensi:

Gedung L1 Lantai 1 FE Unnes
Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang, 50229
E-mail:

p - ISSN 1907 -3720
E -ISSN 2502 -5074

PENDAHULUAN

Dana desa yang sangat besar perlu adanya pengelolaan yang baik agar dapat digunakan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengelolaan keuangan desa tidak terlepas dari yang namanya akuntabilitas. Secara gambaran umum akuntabilitas dapat diartikan sebagai sebuah bentuk kewajiban atau tanggungjawab suatu organisasi untuk mempertanggungjawabkan sebuah keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan organisasi dalam mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan pada periode sebelumnya yang dilakukan secara periodik. Akuntabilitas dalam pelaksanaan pemerintahan desa sangat penting sebab dapat dipergunakan sebagai bentuk tanggungjawab pemerintah desa sebagai entitas yang mengelola dana desa.

Pengelolaan keuangan desa yang akuntabel merupakan pengelolaan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan, mulai dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Tercapainya akuntabilitas dalam pengelolaan dana masyarakat merupakan tujuan utama dari reformasi sektor publik yang dalam konteks ini adalah pemerintah desa. Suatu organisasi publik dalam mengelola dana masyarakat tidak hanya dituntut untuk bisa akuntabel tapi juga harus mampu menyajikan laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 menjelaskan pengelolaan keuangan

desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Ada pula asas pengelolaan keuangan desa yaitu keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran dan pengelolaan keuangan desa dikelola dalam masa 1 tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Dalam pengelolaan dana desa Kepala Desa merupakan orang yang menjadi penanggungjawab dalam pengelolaan keuangan dan aset desa. Permendagri No. 20 Tahun 2018 pasal 68-73 menyatakan tata cara pelaporan keuangan dan pertanggungjawaban yang wajib dilakukan oleh Kepala Desa. Kepala Desa diwajibkan menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap semester tahun berjalan (laporan semesteran). Selain itu, Kepala Desa juga diwajibkan untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran (laporan tahunan). Laporan yang dibuat oleh Kepala Desa ditunjukkan kepada Bupati/Walikota yang disampaikan melalui camat dimasing-masing wilayah. Pertanggungjawaban yg tinggi dari pemerintah desa dalam menyajikan laporan keuangan desa akan memicu peningkatan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa.

Lemahnya pemahaman perangkat desa dalam pelaporan dana desa merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya dugaan kasus penyelewengan dana desa di Jawa Tengah, untuk meningkatkan pemahaman perangkat desa perlu adanya pelatihan kepada perangkat desa agar bisa mengelola dana desa secara akuntabel dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Untuk meningkatkan akuntabilitas dalam mengelola keuangan desa ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Temuan Hanifah & Kiswanto (2017) menjelaskan bahwa pemerintah perlu meningkatkan transparansi dalam penguungkapan dan penyajian berbagai informasi tentang anggaran dan keuangan. Untuk mewujudkan hal tersebut dengan melakukan reformasi dalam penyajian laporan keuangan, yakni pemerintah harus mampu menyediakan semua informasi keuangan secara relevan secara jujur dan terbuka kepada publik. Laporan keuangan merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik dan merupakan salah satu alat ukur kinerja finansial pemerintah daerah. Menurut Bastian (2006) sebagaimana dirujuk Riyansa, dkk (2015) terdapat empat karakteristik laporan keuangan kualitatif pokok yaitu: relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Penyajian laporan keuangan desa disusun guna memberikan informasi mengenai informasi laporan realisasi APBDesa dan catatan atas laporan keuangan yang dimana laporan tersebut

merupakan kewajiban pemerintah desa sebagai pertanggungjawaban guna melaporkan apa yang telah direalisasikan dalam APBDesa. Laporan keuangan yang dibuat oleh pemerintah desa harus memuat informasi yang relevan, jujur, dan terbuka kepada masyarakat dan juga pihak lain yang berkepentingan. Penyajian laporan keuangan desa merupakan faktor yang sangat penting dalam tercapainya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Penyajian laporan keuangan daerah telah mengalami reformasi yang mendasar sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu mengharuskan kepala daerah untuk menyusun dua jenis laporan keuangan baru yang meliputi neraca daerah dan laporan arus kas. Menurut Halim (2002) sebagaimana dirujuk Riyansa, dkk (2015) berpendapat bahwa pada kenyataannya berdasarkan survei ke sejumlah pemerintah daerah, pemerintah daerah tidak serta merta dapat menyusun dua buah laporan keuangan baru tersebut terutama neraca. Belum dimilikinya neraca oleh pemerintah disebabkan antara lain karena sistem dan pelaporan yang selama ini ada belum kondusif ke arah tersebut.

Ketidakmampuan laporan keuangan dalam menerapkan akuntabilitas bukan hanya disebabkan karena laporan keuangan tahunan yang tidak memuat semua informasi relevan yang dibutuhkan para pengguna, tetapi

juga karena laporan tersebut tidak dapat secara langsung tersedia dan aksesibel pada para pengguna potensial. Semakin tinggi perkembangan suatu masyarakat, kualitas sumber daya manusia dan keinginan masyarakat untuk memiliki informasi yang lebih luas tentang pengelolaan keuangan daerah semakin meningkat (Hanifah et al., 2017). Agar informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi prinsip akuntabilitas pemerintah daerah harus meningkatkan aksesibilitas laporan keuangannya, tidak sekedar menyampaikan ke DPR saja, tetapi juga memfasilitas masyarakat luas agar dapat mengetahui atau memperoleh laporan keuangan dengan mudah.

Aksesibilitas secara umum dapat diartikan sebagai sebuah pertanggungjawaban dari pemerintah desa kepada masyarakat secara terbuka dan jujur berupa penyajian laporan keuangan dana desa yang telah direalisasikan dimana laporan tersebut dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat maupun oleh pihak lain yang berkepentingan. Permendagri No 20 Pasal 72 menyatakan laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa wajib diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Informasi sebagaimana yang dimaksud paling sedikit harus memuat laporan realisasi APB Desa, laporan realisasi kegiatan, kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana, sisa anggaran, dan alamat pengaduan. Dalam

pengelolaan dana desa kemudahan masyarakat maupun pihak lain yang berkepentingan untuk mengakses laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah desa sangat penting. Sebab dengan adanya kemudahan tersebut diharapkan dalam proses pengelolaan dana desa tersebut bisa lebih mudah untuk diawasi sehingga akan tercapai akuntabilitas anggaran yang dikelola oleh pemerintah desa.

Selain dari kedua faktor diatas dalam rangka mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yang baik diperlukan juga adanya transparansi. Dengan adanya transparansi diharapkan para pengelola anggaran dana desa dapat meningkatkan rasa tanggungjawab mereka dalam mengelola dana desa sehingga dapat tercapai akuntabilitas pengelolaan dana desa. Transparansi anggaran merupakan hal yang tidak dapat terpisahkan dalam pencapaian pengelolaan keuangan pemerintah yang baik. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Artinya, informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan. Transparansi merupakan bentuk keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan pengeluaran anggaran sehingga publik dapat dengan mudah mendapatkan informasi tentang rencana anggaran pemerintah desa.

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan Wahyuni dkk. (2014) mengenai pengaruh penyajian laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas

pengelolaan keuangan daerah (studi empiris pada Pemerintah Kabupaten Badung). Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan daerah. Hasil penelitian tersebut didukung penelitian yang dilakukan Sumiyati (2015) bahwa ada pengaruh penyajian laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada SKPD Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir. Temuan Fikrian (2017) menunjukkan pengaruh penyajian laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada Satua Kerja Perangkat Daerah Kota Pekanbaru, yang mana hasil kedua penelitian tersebut menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Artinya, semakin lengkap penyajian laporan keuangan maka akuntabilitas akan cepat terlaksana. Sebaliknya jika penyajian laporan keuangan kurang lengkap, maka akan menyebabkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah yang kurang baik.

Namun penelitian di atas tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Riyansa dkk (2015) mengenai pengaruh penyajian laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hasil

penelitian tersebut didukung penelitian yang dilakukan oleh Yolanda (2018) mengenai pengaruh penyajian laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dengan sistem pengendalian internal pemerintah sebagai variabel moderating pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sijunjung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan masih belum dilakukan secara optimal. Hal ini dibuktikan dengan masih adanya pos-pos yang tidak diketahui keberadaannya dalam laporan keuangan yang diaudit. Hal ini mengindikasikan bahwa penyajian laporan keuangan yang tidak dilakukan dengan benar maka akan berimplikasi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Selain itu, temuan Aprilia dkk (2015) mengenai pengaruh aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Bengkulu juga menyatakan bahwa aksesibilitas laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Bengkulu. Hal ini menunjukkan bahwa aksesibilitas laporan keuangan daerah yang baik tidak dapat menjadi gambaran atas akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Aksesibilitas laporan keuangan tidak dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan tersebut pada penelitian terdahulu tidak didukung oleh beberapa penelitian terbaru. Menurut penelitian Nurlaili (2016) mengenai pengaruh aksesibilitas laporan keuangan

terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada SKPD Kabupaten Bengkalis, menyatakan bahwa aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan.

Selain itu, temuan Awalia (2017) menyebutkan bahwa aksesibilitas pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas laporan keuangan daerah. Kedua penelitian tersebut juga sejalan dengan temuan Rahma (2017) ada pengaruh aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada OPD Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu dan Superdi (2017) pengaruh aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sijunjung, penelitian keduanya juga menyatakan bahwa aksesibilitas berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan.

Temuan Angraini (2016) menyatakan bahwa transparansi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Selain itu temuan Hendratmi, dkk (2017) mengenai pengaruh transparansi terhadap akuntabilitas pengelolaan anggaran. menyatakan bahwa transparansi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan anggaran. Kedua hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rosyidi (2018) mengenai pengaruh transparansi

terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa pada seluruh Desa di Kecamatan Salo Kabupaten Kampar. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa transparansi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa.

Hasil penelitian terdahulu oleh Apriliani dkk (2015) mengenai pengaruh penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas terhadap transparansi laporan keuangan pemerintah daerah pada SKPD Kabupaten Klungkung. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas berpengaruh positif signifikan terhadap transparansi laporan keuangan pemerintah daerah. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu terhadap variabel transparansi tersebut maka peneliti bertujuan menggunakan variabel transparansi sebagai variabel intervening dikarekan variabel transparansi dapat berpengaruh positif signifikan terhadap variabel akuntabilitas yang mana dalam penelitian ini merupakan variabel dependen dan juga variabel transparansi dapat pula dipengaruhi oleh variabel penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan yang mana dalam penelitian ini merupakan bagian dari variabel independen.

METODE

Penelitian kuantitatif ini berlokasi di Kabupaten Pati Jawa Tengah. Populasi adalah semua pengelola keuangan desa di 401 desa di Kabupaten

Pati dan diambil sampel sebanyak 45 desa atau 356 responden. Data dikumpulkan dengan kuesioner. Analisis data menggunakan path analysis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa.

Uji parsial dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan, dan kepuasan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Hasil output dari SPSS 21 dapat diketahui sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Regresi Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	8,022	1,476		4,562	,000
1 Penyajian Laporan Keuangan	,787	,054	,597	14,570	,000
Aksesibilitas Laporan Keuangan	,674	,099	,278	6,794	,000

a. Dependent Variable: Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa

Sumber: Data Diolah

Akuntabilitas pengelolaan keuangan = 8,022 + 0,848 X1 + 0,776 X2

1. Konstanta sebesar 8,022 menyatakan bahwa jika tidak ada penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan maka Akuntabilitas pengelolaan keuangan adalah 8,022.
2. Koefisien regresi 0,848 menyatakan bahwa setiap penambahan (karena tanda +) 1 point, penyajian laporan keuangan akan meningkatkan

Akuntabilitas pengelolaan keuangan sebesar 0,848.

3. Koefisien regresi 0,776 menyatakan bahwa setiap penambahan (karena tanda +) 1 point, aksesibilitas laporan keuangan akan meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan sebesar 0,776.

Berdasarkan pada tabel di atas variabel penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan memiliki nilai signifikansi = 0,000 < 0,05 Maka dapat disimpulkan bahwa variabel Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa.

Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Transparansi

Tabel 2. Hasil Regresi Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Transparansi

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	4,840	1,114		6,002	,000
1 Penyajian Laporan Keuangan	,430	,041	,486	10,544	,000
Aksesibilitas Laporan Keuangan	,520	,075	,320	6,940	,000

a. Dependent Variable: Transparansi

Sumber: Data Diolah

Koefisien Regresi

Persamaan Regresi:

$$Z = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

$$Y = 4,840 + 0,379 X1 + 0,436 X2$$

1. Konstanta sebesar 4,840 menyatakan bahwa jika tidak ada penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas

laporan keuangan maka transparansi adalah 4,840.

2. Koefisien regresi 0,379 menyatakan bahwa setiap penambahan (karena tanda +) 1 point, penyajian laporan keuangan akan meningkatkan transparansi sebesar 0,379.
3. Koefisien regresi 0,436 menyatakan bahwa setiap penambahan (karena tanda +) 1 point, aksesibilitas laporan keuangan akan meningkatkan transparansi sebesar 0,436.

Berdasarkan pada tabel di atas variabel penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan memiliki nilai signifikansi = $0,000 < 0,05$ Maka dapat disimpulkan bahwa variabel penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap transparansi.

Uji Hipotesis

Hasil uji model pada penelitian ini yang dibantu dengan program SPSS 21, berikut hasil uji model dalam penelitian ini:

1. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji signifikansi parameter individual (uji statistik t) digunakan untuk mengetahui nilai dari t hitung dan nilai signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Berikut ini hasil pengujian signifikansi parameter individual menggunakan SPSS 21.

Tabel 3. Hasil Uji t dengan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Sebagai Variabel Dependen

Model	Coefficients ^a			t	Sig.
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	8,022	1,476		4,562	,000
1 Penyajian Laporan Keuangan	,787	,054	,597	14,570	,000
Aksesibilitas Laporan Keuangan	,674	,099	,278	6,794	,000

a. Dependent Variable: Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa

Sumber: Data Diolah, 2021

2. Uji Sobel

Mendeteksi Pengaruh Transparansi dalam Memediasi Hubungan Penyajian Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Koefisien jalur dihitung dengan membuat dua persamaan struktural yaitu persamaan regresi yang menunjukkan hubungan yang dihipotesiskan:

Tabel 4. Koefisien Regresi Penyajian Laporan Keuangan terhadap Transparansi

Model	Coefficients ^a			T	Sig.
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	6,508	1,339		4,859	,000
1 Penyajian Laporan Keuangan	,502	,043	,543	11,593	,000

a. Dependent Variable: Transparansi

Sumber: Data Diolah

Tabel 5. Koefisien Regresi Penyajian Laporan Keuangan dan Transparansi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

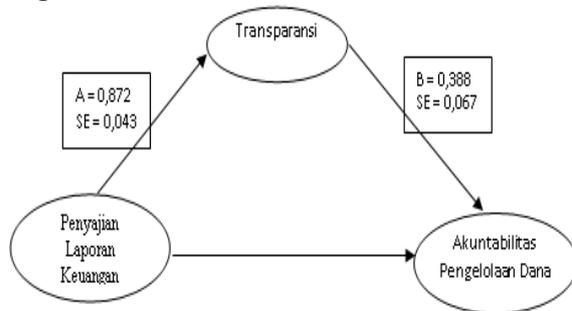
Model	Coefficients ^a			t	Sig.
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	8,463	1,668		5,075	,000
1 Penyajian Laporan Keuangan	,872	,062	,602	14,075	,000
Transparansi	,388	,067	,248	5,794	,000

a. Dependent Variable: Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa

Sumber: Data Diolah

Dari tabel hasil regresi menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi Penyajian Laporan Keuangan terhadap Transparansi sebesar 0,872 dengan standar eror 0.043 dan nilai signifikansi 0.000 kemudian untuk Penyajian Laporan Keuangan mendapatkan nilai koefisien 0.388 dengan standar eror 0.067 dan nilai signifikansi 0.000. Artinya, Penyajian Laporan Keuangan signifikan

berpengaruh langsung terhadap Transparansi demikian juga Transparansi signifikan berpengaruh langsung terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. Jika digambarkan akan terbentuk model.



Gambar 1. Model Mediator 1

Model di atas merupakan model yang terbentuk dari hasil regresi pertama dan kedua sehingga membentuk model analisis jalur (path analysis) dengan variabel Transparansi sebagai mediatornya. Nilai z dari Sobel test tidak dapat dihasilkan langsung dari hasil regresi tetapi dengan perhitungan secara manual dengan rumus sobel tes. Hasil perhitungan nilai z dari sobel test adalah:

$$z = \frac{ab}{\sqrt{(b^2 SE_a^2) + (a^2 SE_b^2)}}$$

$$z = \frac{0,872 \times 0,388}{\sqrt{(0,388^2 \cdot 0,043^2) + (0,872^2 \cdot 0,067^2)}}$$

$$z = \frac{0,338}{0,0518}$$

$$Z = 2,741$$

Dari hasil perhitungan sobel test di atas mendapatkan nilai z sebesar 2,741, karena nilai z yang diperoleh sebesar 2,741 > 1.96 dengan tingkat signifikansi 5% maka membuktikan bahwa transparansi mampu memediasi hubungan pengaruh Penyajian Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa.

Pengaruh Transparansi Dalam Memediasi Hubungan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Koefisien jalur dihitung dengan membuat dua persamaan struktural yaitu persamaan regresi yang menunjukkan hubungan yang dihipotesiskan.

Tabel 6. Koefisien Regresi Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Transparansi

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error			
(Constant)	11.982	1.055		11.353	.000
1 Aksesibilitas Laporan Keuangan	.798	.084	.469	9.534	.000

a. Dependent Variable: Transparansi

Sumber: Data Diolah

Tabel 7. Koefisien Regresi Aksesibilitas Laporan Keuangan dan Transparansi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

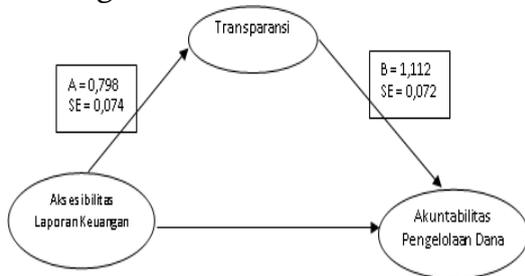
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error			
(Constant)	16.907	1.621		10.431	.000
1 Aksesibilitas Laporan Keuangan	1.112	.123	.418	9.042	.000
Transparansi	.593	.072	.379	8.197	.000

a. Dependent Variable: Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa

Sumber: Data Diolah

Dari tabel hasil regresi menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Transparansi sebesar 0.798 dengan standar eror 0.084 dan nilai signifikansi 0.000 kemudian untuk Transparansi mendapatkan nilai koefisien 1,112 dengan standar eror 0.072 dan nilai signifikansi 0.000. Sehingga Aksesibilitas Laporan Keuangan signifikan berpengaruh langsung terhadap Transparansi demikian juga Transparansi signifikan

berpengaruh langsung terhadap Akuntabilitas pengelolaan keuangan. Jika digambarkan akan terbentuk model:



Gambar 2. Model Mediator 2

Model di atas merupakan model yang terbentuk dari hasil regresi pertama dan kedua sehingga membentuk model analisis jalur (path analysis) dengan variabel *Transparansi* sebagai mediatornya. Nilai *z* dari Sobel test tidak dapat dihasilkan langsung dari hasil regresi tetapi dengan perhitungan secara manual dengan rumus sobel tes. Hasil perhitungan nilai *z* dari sobel test adalah:

$$z = \frac{ab}{\sqrt{(b^2 SE_a^2) + (a^2 SE_b^2)}}$$

$$z = \frac{0,798 \times 1,112}{\sqrt{(1,112^2 \cdot 0,084^2) + (0,798^2 \cdot 0,072^2)}}$$

$$z = \frac{0,887}{0,012}$$

$$Z = 19,51$$

Dari hasil perhitungan sobel test di atas mendapatkan nilai *z* sebesar 19,51, karena nilai *z* yang diperoleh sebesar 19,51 > 1,96 dengan tingkat signifikansi 5% maka membuktikan bahwa *transparansi* mampu memediasi hubungan pengaruh *Aksesibilitas Laporan Keuangan* terhadap *Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa*.

Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Hasil penelitian ini yang membuktikan bahwa penyajian laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Pati, ini memberikan arti bahwa hasil *H₁* diterima. Hal ini didukung oleh hasil analisis yang menunjukkan nilai koefisien beta unstandardized variabel aksesibilitas sebesar 0,379 dan signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 yang berarti bahwa dengan adanya penyajian laporan keuangan daerah yang baik dan benar serta memenuhi karakteristik laporan keuangan, maka dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hal ini membuktikan bahwa penyajian laporan keuangan berpengaruh terhadap *transparansi* dan akuntabilitas laporan keuangan daerah dan dapat di dukung juga dengan teori keagenan.

Dalam teori keagenan masyarakat (*principal*) memberikan wewenang pengaturan dan sumber daya kepada pemerintah (*agent*) berupa pajak, dan lain-lain. Disini pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Dan dengan hasil ini bisa dikatakan pemerintah telah melakukan pertanggungjawabannya kepada masyarakat dalam bentuk penyajian laporan keuangan.

Teori keagenan sejalan dengan penelitian ini yang menjelaskan bahwa pemerintah daerah berfungsi sebagai agen yang diberi kewenangan untuk menyajikan informasi keuangan yang bermanfaat bagi masyarakat dan para

pengguna informasi keuangan pemerintah sebagai prinsipal, baik secara langsung atau tidak langsung melalui wakil-wakilnya.

Penelitian Wahyuni, dkk (2014) sejalan dengan hasil penelitian ini yang menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan berpengaruh signifikan baik secara parsial maupun secara simultan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan. Hasil yang sama ditemukan oleh Hehanusa (2015) dan Nurlaili (2016) yang menemukan bahwa Penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan hasil penelitian, aksesibilitas laporan keuangan desa memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa Kabupaten Pati. Hasil ini dibuktikan dengan hasil uji t yang menunjukkan bahwa nilai signifikansi variabel aksesibilitas laporan keuangan desa sebesar $0,000 < 0,05$, oleh karena itu dapat dikatakan bahwa hipotesis kedua (H_2) diterima. Artinya bahwa dari hasil penelitian ini memberikan bukti bahwa semakin tinggi persepsi pengguna laporan keuangan mengenai akses yang mudah oleh pemerintah untuk memfasilitasi masyarakat luas agar dapat mengetahui atau memperoleh laporan keuangan dengan mudah dan juga semakin baik aksesibilitas laporan keuangan maka semakin baik pula akuntabilitas pengelolaan keuangan. Hal ini karena tersedianya informasi laporan keuangan yang dapat diakses oleh

masyarakat dan tersedianya fasilitas publikasi lewat media masa, internet dll. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya kemungkinan besar karena adanya perbedaan responden.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Mustofa (2012) dan Fikrian (2017) menyatakan bahwa aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan.

Pengaruh Transparansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan pada analisis data yang telah dilakukan, hipotesis pertama menyatakan bahwa Transparansi berpengaruh secara signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan Desa, terbukti bahwa Transparansi mempunyai pengaruh positif terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi variabel Transparansi (Z) adalah sebesar $0,000 < 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa H_3 diterima. Hasil pengujian data menunjukkan bahwa variabel transparansi memiliki pengaruh signifikan atau memiliki pengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian Afrijal (2018) yang menyatakan bahwa transparansi tidak berhubungan positif dengan pengelolaan dana desa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Desa di Kabupaten Pati sangat terbuka kepada masyarakat, khususnya dalam pengelolaan keuangan desa. Hal tersebut didukung dengan jawaban responden yang menjawab

setuju pada setiap item indikator pernyataan yang telah disediakan. Banyak responden mengakui bahwa pemerintah desa di Kabupaten Pati sangat terbuka mengenai pengelolaan keuangan desa hal ini dibuktikan dengan adanya penyediaan informasi di papan pengumuman atau baliho mengenai program yang dilakukan dan anggarannya serta adanya sosialisasi kepada masyarakat setiap pencairan dana dari pendapatan transfer. Dalam pengelolaan keuangan desa, pemerintah mempunyai wewenang dalam penentuan keputusan penting, dimana keputusan tersebut juga mempunyai dampak bagi orang banyak. Oleh karena itu, dalam hal ini pemerintah desa juga harus menyediakan informasi yang lengkap menyangkut segala hal yang telah dikerjakan.

Dikarenakan hasil dalam penelitian ini relevan dengan hasil penelitian sebelumnya, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa implementasi dari prinsip transparansi dan akuntabilitas memiliki peran yang signifikan dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang baik. Oleh karena itu pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, maka dalam pengelolaan keuangannya mulai dari perencanaan yaitu mengestimasi pendapatan dan belanja desa, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan serta pertanggungjawabannya harus patuh dan sesuai dengan pedoman atau peraturan perundang-undangan.

Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa dengan Transparansi sebagai Variabel Intervening

Hasil perhitungan sobel test di atas mendapatkan nilai z sebesar 7,741, karena nilai z yang diperoleh sebesar $7,741 > 1.96$ dengan tingkat signifikansi 5% maka membuktikan bahwa transparansi mampu memediasi hubungan pengaruh Penyajian Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa.

Hasil penelitian sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hehanussa (2015), Aliyah dan Nahar (2012) yang menyatakan bahwa hasil mereka berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan daerah. Hal ini membuktikan bahwa penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan daerah dan dapat di dukung juga dengan teori keagenan.

Dalam teori keagenan masyarakat (principal) memberikan wewenang pengaturan dan sumber daya kepada pemerintah (agent) berupa pajak, dan lain-lain. Disini pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Dan dengan hasil ini bisa dikatakan pemerintah telah melakukan pertanggungjawabannya kepada masyarakat dalam bentuk penyajian laporan keuangan.

Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa dengan Transparansi sebagai Variabel Intervening

Hasil regresi menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Transparansi sebesar 0.930 dengan standar eror 0.074 dan nilai signifikansi

0.000 kemudian untuk Transparansi mendapatkan nilai koefisien 0.921 dengan standar eror 0.064 dan nilai signifikansi 0.000. Sehingga Aksesibilitas Laporan Keuangan signifikan berpengaruh langsung terhadap Transparansi demikian juga Transparansi signifikan berpengaruh langsung terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa.

Dari hasil perhitungan sobel test di atas mendapatkan nilai z sebesar 9,51, karena nilai z yang diperoleh sebesar $9,51 > 1.96$ dengan tingkat signifikansi 5% maka membuktikan bahwa transparansi mampu memediasi hubungan pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa.

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Hehanussa (2015) dan Peggy Sande (2013). Aksesibilitas laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan bisa dikarenakan kurang tersedianya informasi laporan keuangan yang dapat diakses oleh masyarakat dan kurangnya publikasi lewat media masa, internet dll. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya kemungkinan besar karena adanya perbedaan responden.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka simpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Penyajian Laporan Keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Pati. 2) Aksesibilitas Laporan Keuangan Desa

memiliki pengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Pati. 3) Transparansi berpengaruh secara signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. 4) Transparansi mampu memediasi hubungan pengaruh Penyajian Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. 5) Transparansi mampu memediasi hubungan pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrijal. (2018). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi di Desa Pekon Sri Melati Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus). Skripsi. Tidak diterbitkan. Universitas Mitra Indonesia: Bandar Lampung
- Angraini, D. Y. (2016). Pengaruh Penerapan Sistem Keuangan Daerah, Transparansi, Aktivitas Pengendalian Dan Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir). *Jom Fekon*, Vol. 3.
- Aprilia, N., & Dkk. (2015). The Effect Of Financial Statement Presentation And Accessibility Of Financial Statements To The Accountability Of Financial Management Government Of Bengkulu City. *Jurnal Akuntansi Feb Universitas Bengkulu*, Vol. 3.

- Apriliani, N. K., & Dkk. (2015). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Karakteristik Kualitatif, Dan Aksesibilitas Terhadap Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung). *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol. 3 No. 1.
- Awalia, R. (2017). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan Dan Aktivitas Pengendalian Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Skpd Kabupaten Kampar Tahun 2017). *Jom Fekon*, Vol. 4.
- Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. (2015). Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa. Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah.
- Bastian. (2006). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Fikrian, H. (2017). Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan, Penyajian Laporan Keuangan Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pekanbaru). *Jom Fekon*, Vol. 4.
- Halim, Abdul. (2002). *Akuntansi Keuangan Daerah*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Hanifah, F. F., & Kiswanto. (2017). The Effect of Political Competition, HDI, and Leverage on The Availability and Accessibility of Local Financial Information on The Website. *Accounting Analysis Journal*, 2, 242–252.
- Hehanussa, Salomi J. 2015. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Pemerintahan Kota Ambon). *Jurnal, UNISSULA*
- Khikmah, N., & Prihandono, D. (2017). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Dan Citra Perusahaan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Melalui Transparansi. *Management Analysis Journal*, 6(4), 435-447.
- Mustofa, Anies Iqbal. 2012. Pengaruh Penyajian dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pemalang. *Accounting Analysis Journal*. ISSN 2252-6765. Universitas Negeri Semarang.
- Nahar, Aida dan Siti Aliyah. (2012). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Pemerintahan Kabupaten Jepara). *Jurnal Akuntansi dan Auditing*, 8(2), 2012.
- Nurlaili. (2016). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksebilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Studi Pada SKPD Kabupaten Bengkalis. *JOM Fekon*, 3(1):1-16.

- Peggy, Sande. (2013). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal, Universitas Negeri Padang*.
- Putri, F. E. (2017). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Dan Tingkat Pengungkapan Sukarela Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Skpd Provinsi Riau). *Jom Fekon*, Vol. 4.
- Rahma, N. (2017). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Aksesibilitas Laporan Keuangan Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Opd Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu). *Jom Fekon*, Vol. 4.
- Riyansa, R., & Yuniilma, F. P. (2015). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman). *Jurnal Akuntansi 'Fakultas Ekonomi Universitas Bung Hatta*.
- Rosyidi, M. (2018). Pengaruh Transparansi, Kompetensi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Empiris Pada Seluruh Desa Di Kecamatan Salo Kabupaten Kampar). *Jom Feb*, Vol. 1.